

**REPUBLIK TURKI:
DARI KHILAFAH ISLAMIAH MENUJU NEGARA-BANGSA**

Abu Bakar

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonpmi Islam (FSEI) IAIN Pontianak
Email: ahmedibniabubakar@gmail.com

Abstract

Ottoman Caliphate in Istanbul was the last empire based on Islamic caliphate system. It ruled some regions in Asia, Africa and Europe. Islam as a supra identify was able to unite nations under the flag of Islamic caliphate. The decline of Ottoman caliphate was inevitable as the effect of social development and international political dynamics that led to the caliphate's engagement in World War I. Islamic caliphate was considered fail to save the empire that led to immerging idea of nationalism in order to recover ottoman people who lost the battle. The nationalism of Turkey was ruled by military that latter turned into Nation State of The Republic of Turkey. Therefore, the idea of Islamic caliphate must be diminished and replaced by secularism. This led to the conflict between Islamists and nationalists, and eventually nation state of Turkey managed to get rid of Islamic caliphate system.

Keywords: Ottoman caliphate, nationalism, and nation state of Turkey.

Abstrak

Kekhalifahan Usmaniyah di Istanbul adalah pemerintahan terakhir yang dibangun berdasarkan ide khilafah islamiyah. Kekuasaannya meliputi sebagian Asia, Afrika, dan Eropa. Islam sebagai supra identitas mampu menyatukan pelbagai bangsa di bawah bendera khilafah islamiyah. Kemunduran Usmaniyah tidak terelakan seiring dengan perkembangan masyarakat dan dinamika politik internasional yang berujung pada keterlibatannya dalam Perang Dunia ke I. Khilafah islamiyah di dalam kontek itu dinilai tidak dapat menyelamatkan pemerintahan Usmaniyah. Selanjutnya, muncul ide nasionalisme yang didesain guna membangun kembali masyarakat Usmani yang kalah perang sebagai satu bangsa. Nasionalisme Turki di bawah tangan militer selanjutnya melahirkan Negara Bangsa Republik Turki. Di dalam rangka itu, kekuatan ide khilafah islamiyah dinilai perlu dihilangkan dari negara Turki melalui kebijakan sekulerisme yang menimbulkan masalah antara kelompok islamis dan nasionalis.

Kata Kunci: Khilafah Usmaniyah, Nasionalisme, dan Negara Bangsa Turki

PENDAHULUAN

Turki merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim yang berdiri setelah usai Perang Dunia Pertama mendahului negara-negara muslim di pelbagai kawasan lain di Asia dan Afrika. Republik Turki adalah satu fenomena yang unik, bahkan dalam batas tertentu merupakan sebuah kasus yang cukup “kontroversial”. Hal demikian itu dikarenakan oleh latar belakang sejarah Turki sebagai bagian terpenting dari alur cerita peradaban Dunia Islam. Pada lembaran sejarah Islam, leluhur bangsa Turki adalah pengemban khilafah islamiyah yang berarti pemimpin entitas sosio-politik ummat muslim yang mendunia. Meskipun demikian itu Turki memasuki dasa warsa ketiga abad ke dua puluh sampai tahun-tahun selanjutnya berbeda dengan masa lalunya. Mereka memilih meninggalkan khilafah islamiyah beralih kepada negara bangsa. Deklarasi Turki sebagai negara bangsa adalah pilihan politik pertama di tengah masyarakat muslim internasional.

Di masa kekhilafahan, agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan institusional dan struktural pemerintahan Ustmaniyah. Otoritas khalifah tampil dengan makna sebagai representasi kekuasaan Tuhan dari langit, sehingga agama harus dipahami sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut berbeda, ketika Turki berdiri sebagai negara bangsa, sumber otoritas tidak lagi berasal dari Tuhan melainkan dari rakyat. Mereka dalam kehendak dan identitasnya menggantikan tafsir agama. Logika teoritik inilah yang dijadikan dasar Turki untuk beralih pada kehidupan negara bangsa.

Hal yang menjadi sebab bagi transformasi khilafah islamiyah menuju negara bangsa Turki dinilai menarik untuk diungkapkan dalam kajian akademik. Nasionalisme di dalam kasus Turki tentu menjadi sorotan utama karena ideologi tersebut sedang bangkit di kawasan Asia, Afrika, dan sejumlah negara Eropa yang menjadi bagian wilayah kekuasaan Usmaniyah. Ideologi tersebut di banyak tempat menjadi kekuatan yang melawan kekuasaan khalifah di Istanbul. Pada gilirannya, nasionalisme bangsa Turki sendiri yang mengakhiri khilafah islamiyah, terwujud negara bangsa. Pada saat sama, nasionalisme masa itu perlu mendapatkan gambarannya untuk menjawab masalah khilafah islamiyah di tengah masyarakat muslim internasional.

DINASTI TURKI USMANI DALAM SEJARAH ISLAM

Geneologi kebangsaan Turki berasal dari sebuah suku Oghuz di sebelah Utara Cina. Mereka merupakan sebuah rumpun keluarga yang gemar mengadakan pengembaraan ke daerah lain untuk mendapatkan sumber daya kehidupan. Di abad ke XIII Masehi – ketika kekuatan militer bangsa Mongol mengadakan serangkaian ekspedisi militer dan menaklukkan ke pelbagai penjuru kawasan – leluhur bangsa Turki ini, merasa terdesak dan bermigrasi ke wilayah Barat meminta perlindungan kepada saudara serumpun mereka Bani Saljuk yang sedang berkuasa di Baghdad dan daerah sekitarnya.¹

Setelah keruntuhan pemerintahan Bani Saljuk sebagai akibat ekspedisi militer bangsa Mongol ke Baghdad, Utsman – pemimpin mereka yang kelak dianggap sebagai bapak pendiri dinasti Utsmaniyah – dalam waktu singkat telah berhasil mengonsolidasikan kekuatan politik serta mengorganisir sebuah kesatuan militer. Mereka pun dengan segera bergerak dan menaklukkan satu per satu kerajaan-kerajaan kecil semi otonom di Asia Tengah dan sekitarnya, hingga mencapai wilayah perbatasan imperium Byzantium. Mereka tampil sebagai pengganti dan pembangun kembali puing-puing reruntuhan Bani Saljuk serta penerus kekhalifahan Islam-Sunni yang jatuh dari Dinasti Abasiyah.

Kekuatan militer yang digerakan oleh semangat agama menghantarkan mereka mencapai puncak kejayaan dan sekaligus mampu menempatkan dinasti Turki Utsmani sebagai super power dunia. Kejayaan tersebut tidak lepas dari pengakuannya sebagai penerus khilafah islamiyah. Dalam rentang masa satu abad kemudian, mereka telah berdiri menancapkan kekuasaan di Afrika Utara dan Mesir, Somalia, Sudan, Jazirah Arab, serta Asia Tengah, negara-negara Balkan dan sebagian daratan Eropa hingga berbatasan dengan Wina. Pada abad ke XVI, mereka telah mendunia mewarisi kebesaran imperium Byzantium Timur dan

¹ Hal ini menjelang keruntuhan Bani Seljuk akibat ekspansionisme Mongol ke pelbagai kawasan Islam. Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1989), hlm. 324. Bani Saljuk merupakan rezim pemerintahan dinasti Abasiyah yang menggantikan rezim Buwaih. Hal terjadi di era kemunduran Abasiyah masa al-Qo'im (1031-1075) dan pada masa tersebut khalifah Abasiyah tidak lebih hanya sebagai boneka dan simbol kekhalifahan Islam semata. Philip K. Hitti, *History of Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), 603.

dinasti-dinasti kekhalifahan Islam terdahulu.² Dinasti Ustmani sebagai pemangku khilafah islamiyah mendeklarasikan diri dan sekaligus memposisikan diri sebagai pelindung kelompok muslim sunni di pelbagai kawasan penjuru dunia.

Dinasti Turki Usmani di akhir abad ke XVII mengalami kemunduran. Hal tersebut dipicu oleh gerakan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ke pelbagai kawasan Asia dan Afrika yang menjadi sebagian wilayah kekuasaannya. Di lain alur masalah itu, semangat dan gerakan nasionalisme bangsa-bangsa Eropa di beberapa propinsial kawasan Balkan mempercepat masa kemunduran Dinasti Turki Utsmani. Pada rentang masa tersebut, mereka terus mengalami kekalahan dan secara terpaksa harus kehilangan banyak wilayah propinsial.

Kekalahan militer Khalifah mereka di Wina yang diakhiri dengan kesepakatan-perjanjian Carlowiz, mengakibatkan Istanbul menyerahkan daerah Hongaria, Slovenia, Kroasia, Hemenietz, Podolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia ke Habsburg dan Venesia. Memasuki abad ke XVIII, khalifah kembali kehilangan wilayahnya di Eropa Timur sebagai akibat dari kekalahan dalam perang Crimea melawan militer Kaisar Rusia. Sementara, bangsa Yunani secara terus menerus mengobarkan perang kemerdekaan untuk melepaskan diri dari pemerintahan khalifah di Istanbul.

Di kawasan lain, Afrika Utara lepas dari kekuasaan Istanbul dan membentuk blok kekuatan tersendiri. Hal ini disusul oleh Mesir, sebagai akibat hegemoni kolonial Inggris yang menjadikan Mesir sebagai negara protektorat. Aljazair dan Tunisia pun terpisah serta diklaim sebagai bagian dari wilayah Perancis, sedangkan kekuatan Italia memperoleh kawasan Tripoli.³ Kondisi Usmaniyah terus memburuk ketika serangkaian gerakan separatis berkembang di semenanjung Arab. Hal ini direpresentasikan oleh gerakan religio-politik Syaikh Muhammad bin Abdulwahab di Hijaz. Di perempat awal abad ke XX, Dinasti Turki Usmani hanya berdiri di atas kawasan Asia Tengah–Anatolia sedangkan wilayah propinsial telah memisahkan diri dan berada dalam kekuasaan rezim kolonial bangsa-bangsa Eropa.

² Mengenai wilayah kekuasaan rezim Utsmani lihat Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik* (Jakarta: Kencana, 2003), 243.

³ Lihat Philip K. Hitti, *History of Arabs...*, 915-916.

DINASTI TURKI UTSMANI SEBAGAI PEWARIS KHILAFAH ISLAMIYAH

Sejak masa khalifah ke VIII dinasti Abasiyah–Mu`tashim Billah, hingga akhir dinasti Turki Utsmani, seorang khalifah diartikan sebagai wakil Tuhan di bumi dengan bergelar “bayangan Tuhan di muka bumi”. Dalam konsepsi tersebut, seorang khalifah bukan hanya pemegang otoritas agama sebagaimana Tahta Suci Rumawi, tetapi meliputi pula sebagai pemegang otoritas keduniaan.⁴ Meskipun dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan, otoritas keduniaan seorang khalifah bersifat nominal. Seorang sultan justru penguasa otoritas keduniaan yang sesungguhnya, seperti kasus dinasti Abasiyah di masa rezim Buwaihi dan Seljuk.

Sejarah kekhalifahan Islam berakhir ketika M. Kemal Attaturk menjadi penguasa politik atas puing-puing kekalahan dinasti Turki Utsmani di Perang Dunia ke I. Dalam kasus tersebut, ia tidak hanya memperoleh kecaman dari komunitas muslim Turki melainkan dari muslim di pelbagai kawasan. Gerakan Khilafah di India yang mendesak perdana menteri Turki untuk mempertahankan institusi khilafah islamiyah. Hal ini sekaligus merupakan sebuah bukti bahwa khalifah di Istanbul memiliki pengaruh di tengah muslim. Di tahun 1924, Syarief Husin di Makkah membentuk dewan khalifah. Satu tahun kemudian di Kairo, raja Fuad merencanakan kongres Dunia Islam untuk mendiskusikan masalah khalifah. Di tahun 1926 di Makkah, raja Saud pun ikut mengadakan kongres khilafah. Isu-isu tentang kongres tersebut sempat melibatkan muslim di Indonesia.⁵ Isu khilafah islamiyah hingga sekarang pun masih menjadi agenda utama dari beberapa gerakan kelompok muslim, seperti Hizbut Tahrir. Beberapa kasus di atas, dapat memberikan sebuah gambaran bahwa institusi khilafah islamiyah adalah milik dan persoalan Dunia Muslim yang nasibnya berakhir di tangan Turki Usmani.

Dalam sejarah dinasti Utsmaniyah, Sultan Salim merupakan raja pertama yang memperoleh gelar khalifah atau sebagai wakil Tuhan di bumi.⁶ Sejak masa

⁴ Ibid, 231.

⁵ Aqib Suminto, *Politik Islam HIndia Belanda* (Jakarta: LP3ES, 1985), 86-88.

⁶ Sultan memperoleh gelar tersebut setelah menaklukkan Mesir dan memaksa khalifah terakhir Abasiyah, al-Mutawakil Billah untuk meletakkan dan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada sultan Salim dari Utsmani. Dalam masa tersebut, banyak raja-raja di pelbagai kawasan datang kepada al-Mutawakkil untuk meminta izin dan restu serta sebuah pengakuan sebagai sultan. Lihat Hamka, *Sejarah Ummat Islam* (Jakarta: Nusantara, 1961), 187.

tersebut, seorang khalifah memiliki kewajiban untuk menegakkan dakwah Islam, memperluas dan memertahankan wilayah muslim, sekaligus sebagai pelindung dua tempat suci muslim.⁷ Sebuah ancaman politik-militer atas kawasan muslim berarti menjadi urusan dan bagian tanggung jawab dari kekhalifahan, sehingga dinasti Utsmaniyah seolah-olah sebagai benteng bagi muslim dari serangan musuh dari luar Islam. Rumusan teoritis tersebut menempatkan otoritas kekhalifahan Utsmaniyah meliputi entitas masyarakat muslim di pelbagai kawasan.⁸

Melalui pembacaan di atas – perspektif teoritis – kehadiran dan eksistensi kemegahan dinasti Turki Utsmani di dalam sejarah peradaban Islam berkaitan dengan doktrin khilafah islamiyah yang terlembaga dalam tradisi Islam-sunni. Hal itu sebagaimana diakui mereka yang menyatakan diri sebagai pewaris otoritas kekhalifahan Abasiyah dan Umayyah serta al-Rasyidun. Seorang khalifah Dinasti Utsmaniyah menganggap diri mereka sebagai pemimpin muslim yang memiliki hak untuk menuntut sebuah ketaatan muslim.⁹ Di masa Sultan Abdul Hamid – setelah menegaskan klaim sebagai khalifah dalam konstitusi 1876 – tercatat pernah mengirim utusan ke pelbagai daerah muslim, seperti Mesir, Tunisia, India, Afganistan, Cina, Nusantara (kerajaan Islam di Indonesia) untuk mencari pengakuan status sultan sebagai khalifah.¹⁰ Dalam kasus lain, kesultanan Aceh tercatat pernah menerima bantuan militer serta memiliki hubungan diplomatik dengan rezim Utsmani, sekaligus mengklaim sebagai bagian dari wilayah propinsial Istanbul.¹¹ Melalui saluran inilah Dinasti Utsmaniyah memperoleh dukungan dan legitimasi politik–kekuasaan dari Dunia Muslim. Hal ini menuntut

⁷ Lihat Mansyur, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), 60-61.

⁸ Konsepsi demikian ada dalam tradisi Islam sunni dan berbeda dengan gagasan Imamah dalam tradisi Islam Syi`ah. Ibnu Khaldun–mewakili tradisi Islam sunni–mengatakan bahwa mendirikan institusi khilafah islamiyah adalah kewajiban dan perlu bagi eksistensi sosio-politik masyarakat muslim. Sebagaimana dikutip Ali `Abd al-Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm; Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi Islam* (Mesir: tt.p., 1925), hlm. 60-61. Sebagai perbandingan lihat al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1996), hlm. 16. Lihat pula W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (Edinburg: Edinburg University Press, 1968), 40-42.

⁹ Lihat Abd. Salam Arif, “Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara” dalam *Negara Tuhan* (Yogyakarta: SR-Ins Publissing, 2004), 29.

¹⁰ Thomas W. Arnold, *The Caliphate* (London: Routledge, 1965), 173-177.

¹¹ Azyumardi Azra, *Renaissance Islam Asia Tenggara* (Bandung: Risdakarya, 2000), 90.

para raja di pelbagai kawasan muslim untuk memberikan sebuah penghormatan kepada khalifah–sultan di Istanbul.¹²

Fenomena demikian nampak semakin menguat di tahun 1914, ketika Panitia Nasional Pembelaan Khalifah di Istanbul mengeluarkan sebuah himbauan. Dalam selebaran tersebut, dihimbau agar semua muslim melibatkan diri melawan bangsa-bangsa imperialis-kolonialis Eropa. Maksud khalifah adalah untuk memunculkan rasa solidaritas muslim internasional, sehingga akan membantu Istanbul dalam Perang Dunia ke I. Kebijakan luar negeri khalifah tersebut direspon tidak hanya oleh masyarakat Timur Tengah dan Arab, tetapi juga oleh kerajaan-kerajaan di kawasan nusantara dan cukup menggelisahkan pemerintah kolonial Belanda.¹³

IDE NASIONALISME DALAM DINASTI TURKI UTSMANI

Di masa lalu, seluruh wilayah kekuasaan Turki Usmani tidak terikat oleh satu basis ideologi politik yang berpijak pada realitas empiris, seperti sejarah, etnisitas dan sosio–kultural, kecuali oleh doktrin muslim sunni–khilafah islamiyah.¹⁴ Oleh sebab itu, di masa rezim Utsmani Muda agama Islam memperoleh rumusan baru dan diletakkan sebagai supra–identitas bagi dinasti Utsmani. Tujuan utama perumusan tersebut adalah untuk mentransendensikan batasan-batasan alamiah dan sosio–kultural sehingga membentuk sebuah entitas masyarakat politik–muslim di bawah institusi khalifah–islamiyah. Meskipun demikian, rumusan ideologi tersebut tidak dapat bertahan ketika dihadapkan pada realitas sosial politik yang menghendaki nasionalisme sebagai dasar bernegara.

¹² Misal adalah penyebutan nama khalifah dalam khutbah dan sekaligus memberikan untain doa. Menurut Hamka hal ini dipraktikkan pula di kawasan Melayu, lihat Hamka, *Sejarah Ummat.....*, 186.

¹³ Kees van Dijk,, “Ketakutan Penjajah, 1890-1918 Pan Islamisme dan Persekongkolan Jerman-India” dalam *Tiga Kekacauan dan Kerusuhan*, terj. Lilian D. T. (Jakarta: INIS, 2003), 36-37.

¹⁴ Lothrop Stoddard mengatakan bahwa rezim Turki berdiri tanpa peradaban atau kurang peduli terhadap persolan kebudayaan dan lebih mengedepankan persoalan militer dan politik, sehingga rezim ini penuh dengan kisah peperangan Lothrop Stoddard, *Dunia Baru Islam*, terj. S, Gazalba dkk. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 25. Masyarakat Utsmani dikelompokkan melalui identitas keagamaan, seperti millet Islam, Yahudi dan Kristen, bukan Arab, Persi, Kurdi, Yunani, Armenia, bukan berdasarkan etnisitas dan sosio-kultural. Lihat Harun, *Pembaharuan dalam Islam....*, 126.

Rumusan Islam sebagai supra-identitas di atas tidak lain adalah sebagai sebuah usaha untuk mengatasi kemunduran dinasti Turki Utsmani yang semakin tampak di depan mata. Hal ini sebagai akibat pergolakan sosial-politik di pelbagai wilayah propinsial dan semakin meningkatnya gerakan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa ke Asia dan Afrika. Dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, di Eropa muncul ide dan gerakan nasionalisme yang terus memasuki negara-negara Balkan, sebuah kawasan propinsial dinasti Utsmani. Ide nasionalisme di jazirah Arab juga memperoleh ruang sebagai akibat kesadaran sosial-politik. Khalifah di Istanbul dalam format dan konstelasi politik demikian itu sangatlah tidak diuntungkan dan merasa terancam sehingga harus bereaksi mencari sebuah jalan keselamatan. Usaha-usaha mempertahankan dan mengembalikan kejayaan dinasti Turki Utsmani semakin mendesak ketika bendera negara-negara Eropa, seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Itali, Perancis, dan Rusia terus menjarah ke kawasan Asia dan Afrika.

Masyarakat Kristen Utsmani merupakan kelompok pertama yang menghidupkan semangat dan tujuan-tujuan nasionalisme serta mengusulkan bahwa sekumpulan individu yang memiliki kebersamaan etnis, linguistik serta keagamaan sudah seharusnya memiliki negara teritorial tersendiri. Ide dan seruan sama muncul di Suria dan Beirut. Ide dan gerakan tersebut muncul dan terus menguat di kawasan negara-negara Balkan dan Yunani. Kasus yang sama terjadi pula di Mesir, perkembangan ilmu Egyptologi dan kebudayaan Mesir telah merangsang ide serta pembentukan identitas kebangsaan, sehingga mereka berkeinginan untuk memisahkan diri dari Istanbul.¹⁵ Sementara bangsa-bangsa Arab pun terus bergolak menentang kekuasaan Istanbul yang dirasa tidak membawa mereka kepada suatu kesejahteraan, sehingga mendorong mereka merumuskan gagasan nasionalisme.¹⁶ Kekesalan bangsa-bangsa Arab tersebut

¹⁵ Gerakan ini direpresentasikan oleh kaum nasionalisme–faraonisme yang diilhami oleh kemajuan ilmu egyptologi, sebuah kajian tentang Mesir Purba. Gerakan ini menuntut berdirinya Negara Mesir yang terpisah dari Dunia Arab, termasuk kekhilafahan Utsmani. Aliran lainnya adalah nasionalisme–meditereania, sebuah kesadaran nasionalisme Mesir yang berorientasi pada kultur laut Tengah serta menuntut keterpisahan Mesir dari Dunia Arab dan termasuk pula Utsmani. Lihat Tim Redaksi, *Islam, Negara dan Hukum*, terj. Syamsul Anwar (Jakarta: INIS, 1993), 47.

¹⁶ Dialog Jumat, “Konspirasi Untuk Meruntuhkan”, *Republika*, 3 Maret, 2006.

nampak pula pada sikap para pemuda mereka di Paris yang mengumumkan sebuah nasionalisme Arab yang didukung Inggris dan Perancis dalam suatu kongres. Kecenderungan umum di atas semakin diperparah dengan kemunculan gerakan kebangsaan, seperti Pan-Kurdisme; sebuah gerakan yang bercita-cita menyatukan bangsa Kurdi di Iran, Syiria, Turki dan negara-negara Balkan.¹⁷

Merespon fenomena tersebut, para sarjana dan elit politik Istanbul dengan segera merumuskan sebuah ideologi besar yang diharapkan mampu menjaga kelanggengan pemerintahan dinasti Turki Utsmani yang telah mendunia. Dalam waktu yang relatif singkat muncullah beberapa gagasan tentang ideologi pemersatu. Pertama adalah Utsmanisme, seperangkat ideologi yang dibangun untuk mengatasi kecenderungan disintegrasi dan separatisme imperium. Ideologi ini menggagas sebuah ikatan kebersamaan dan kesamaan sebagai rakyat Utsmani dan mengesampingkan perbedaan agama, etnisitas, dan sosio-kultural. Kedua muncul ideologi Islamisme yang lebih bersifat universal. Ide yang melintasi klaim geografis dan batas teritori wilayah Utsmaniyah. Ideologi itu menekankan sebuah kesamaan identitas keagamaan-Islam sebagai sebuah nasionalitas. Ketiga adalah Pan-Turkisme yang lebih berorientasi kepada unsur etnisitas dan kultur Turki secara umum. Ideologi ini mengatakan bahwa semua etnis Turki di mana pun mereka adalah bangsa tunggal dan meski bersatu dan membentuk entitas sosio-politik di bawah Turki Utsmani di Anatolia.¹⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, Islamisme merupakan ideologi yang cukup berpengaruh dan menjadi kebijakan politik luar negeri pemerintahan Utsmaniyah di kemudian hari.

Ideologi Islamisme menguat di tahun 1914, ketika sultan dalam kebijakan luar negerinya menekankan isu-isu seputar kepentingan agama Islam dan eksistensi khilafah islamiyah.¹⁹ Sebuah gagasan tentang solidaritas muslim

¹⁷ Mengenai gerakan Kurdistan ini lihat Clifford Geerts, *Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara Baru*, ed. Juwono S. (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), 4.

¹⁸ Mengenai Utsmanisme, Islamisme, Pan-Turkisme lihat Harun, *Pembaruan dalam...*, 128-140. Ideologi ini mirip dengan di Rusia masa Tsar dengan Pan-Slavisme atau Kaisar Jerman dengan pan-Germanisme dan bahkan Kaisar Perancis ketika kekuasaan mereka mulai meredup.

¹⁹ Sejak tahun 1880, kebijakan luar negeri Turki lebih diwarnai oleh isu-isu agama. Hal ini lebih didasari oleh keinginan sultan untuk menarik dukungan politik masyarakat muslim di pelbagai kawasan sebagai akibat dari kekalahan Istanbul dalam Perang Turki-Rusia yang memaksa sultan menerima perjanjian Fashoda. Kees van Dijk, "Ketakutan Penjajah...", 31-32.

internasional dalam rangka menghadapi kekuatan bangsa-bangsa Eropa di hampir semua wilayah propinsial Utsmani. Dalam masa tersebut, Istanbul mengalami serangkaian kekalahan perang dan persaingan politik-ekonomi.²⁰ Dalam konteks di atas, universalisme Islam dalam konstruk ideologi khilafah islamiyah telah menimbulkan serangkaian masalah yang besar. Hal ini lebih dikarenakan oleh kesibukan Istanbul dalam urusan internasional – sebagai konsekuensi logis dari peran pemimpin spiritual Dunia Muslim atau khilafah islamiyah – secara otomatis masalah dalam negeri agak terabaikan.

Setelah Utsmanisme, Turkisme dan Islamisme muncul sebuah ideologi nasionalisme lain yang diusung Zia Gokalp, seorang sarjana Turki. Nasionalisme Gokalp lebih bersifat realistik-empirik, menurutnya nasionalisme meski didasarkan pada ikatan dan persamaan identitas kultural yang bersifat unik, subjektif, muncul dalam lingkungan suatu masyarakat.²¹ Dalam pandangannya, sebuah nasionalitas bukan suatu komunitas religius yang diikat oleh persamaan agama serta kekeluargaan etnis yang diikat oleh adat-istiadat lama atau bukan pula sebuah ikatan suatu usaha-usaha di bidang sosial-ekonomi-politik. Dalam konteks ini, Gokalp menolak westernisasi yang berambisi meniru bangsa Eropa, Turkisme yang berupaya menghidupkan kembali adat etnis Turki pra-Islam, Islamisme yang menghidupkan Islam di masa lalu. Secara definitif, nasionalisme Gokalp adalah sebuah kolektivitas sosial yang meliputi keragaman pendidikan, memiliki bahasa, emosi, ideal-ideal, agama, moralitas, dan rasa estetika..²²

Dalam relatif waktu yang bersamaan, muncul usaha-usaha untuk mewujudkan agenda nasionalisasi bangsa Turki, di mana para ahli bahasa terus berkonsentrasi terhadap reformasi bahasa. Di lain sisi, sarjana-sarjana Eropa telah

²⁰ Harapan dari kebijakan ini adalah kemunculan perang antara negara-negara berpenduduk muslim di berbagai kawasan – ketika masa tersebut hampir semua negara muslim berada dalam kekuasaan penjajah bangsa Barat – dengan kekuatan negara-negara Eropa sehingga akan melemahkan kekuatan bangsa-bangsa Eropa yang terus merongrong rezim Utsmani. Fenomena ini semakin menguatkan semangat Pan Islamisme model Jamaluddin al-Afgani. Tercatat bahwa pada tahun 1892, Jamaluddin al-Afgani berkunjung ke Konstantinopel untuk membahas isu-isu tersebut. Meskipun ada pertentangan antara al-Afgani dengan Sultan Abdul Hamid II. Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Pergerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 53.

²¹ Harun, *Pembaruan dalam...*, 124.

²² Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Psot Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 41.

berhasil mendalami bahasa dan kultur Turki dengan memperkenalkan gagasan tentang “Masyarakat Turki”, sehingga semakin mendorong serangkaian gerakan kampanye tentang tema-tema identitas kebangsaan di tingkat masyarakat bawah. Fenomena tersebut, merepresentasikan sebuah kesadaran kebangsaan Turki di tengah kegelisahan politik dan sekaligus sebagai respon masyarakat terhadap marak dan menjamurnya gagasan nasionalisme di pelbagai kawasan. Ide tentang bangsa Turki merupakan usaha pembentukan identitas kewargaan baru yang berakar pada nilai-nilai kesejarahan Turki Utsmani, bukan identitas kesejarahan Islam ataupun Turki pra-Islam.²³

Pada akhir dua dasa warsa pertama abad ke XX, dinasti Turki Utsmani telah kehilangan seluruh daerah kekuasaan dan hanya menguasai Anatolia yang berpenduduk mayoritas warga Turki dan sebagian kecil warga keturunan Yunani, Kurdi, serta Armenian. Keterlibatan Istanbul dalam blok German pada Perang Dunia ke I dengan kemenangan di pihak sekutu membentangkan pintu masuk kekuatan militer dan politik bangsa Barat ke wilayah kekuasaan Turki Usmani. Inggris, Perancis, dan disusul Amerika serta ambisi Yunani tentang romantisme di masa lalu meruntuhkan kekuasaan Dinasti Utsmani di Istanbul.

Pada bulan November 1918, armada kapal perang dan militer sekutu memasuki Istanbul. Kabinet Utsmani Muda – rezim yang sedang berkuasa – membubarkan dan mengundurkan diri. Sebagian di antara mereka melarikan diri ke luar negeri, seperti Enver Pasya dan Jamal Pasya. Sementara Perdana Menteri baru terpilih langsung mengadakan perdamaian dengan sekutu.²⁴ Cerita akhir dari Perang Dunia ke I seolah-olah telah menunjukkan kegagalan Islamisme sebagai basis ideologi untuk mempertahankan eksistensi dinasti Utsmani yang menopang khilafah islamiyah. Dalam konteks tersebut, nasionalisme semakin menemukan

²³ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. M. Ghufan jilid tiga (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 82-83. Serangkaian gerakan pembaruan yang menjadi embrio ide Nasionalisme telah muncul sejak lama. Diawali oleh Tanzimat (1839), yang menggagas ide demokrasi disusul gerakan Turki Muda (1876), yang berusaha membatasi wewenang dan fungsi khalifah Turki.

²⁴ Lihat pula H.A. Mukti Ali, *Islam dan sekulerisme di Turki Moderen* (Jakarta: Djembatan, 1994), 147.

bentuk dan momentum untuk menunjukkan peran fungsionalnya sebagai sebuah basis ideologi negara.

Kekalahan Istanbul di Perang Dunia I membuka pintu masuk bagi bangsa Eropa untuk membagi-bagi daerah kekuasaan Utsmaniyah. Mereka membuat mandat dan negara protektorat di sejumlah daerah di Jazirah Arab. Sementara, Yunani terus berambisi untuk menguasai Anatolia dan sejumlah wilayah lainnya. Di batas itu masyarakat Utsmani merasa berdiri melawan sekutu dengan tanpa bantuan masyarakat muslim lainnya. Situasi tersebut menghantarkan Mustafa Kemal Attaturk menjadi penguasa setelah berhasil memimpin kaum nasionalis melawan pendudukan bangsa-bangsa Eropa di wilayah Turki.

Di rentang masa itu muncul suatu kesadaran umum di tengah muslim bahwa nasionalisme adalah cara terbaik untuk memperbaiki keadaan masyarakat. Hal demikian itu dengan mengandaikan sebuah negara bangsa yang dibangun berdasarkan konstitusi. Kemajuan negara-negara di benua Eropa selalu dijadikan argumentasinya. Jepang adalah salah bukti nyata ketika negara tersebut berhasil menandingi Eropa jelang Perang Dunia II melalui reformasi hukum tata negara di tengah sistem kekaisaran. Meskipun demikian, sejumlah pemimpin muslim masih tetap pada ideologi islamisme Sunni yang menghendaki adanya kekhalifahan Islam, seperti Rasyid Ridha di Mesir. Suara mereka tampak tidak mampu menghalau gerakan nasionalisme. Negara-negara di Jazirah Arab tetap melihat nasionalisme dan konstitusionalisme merupakan suatu keharusan untuk melahirkan negara merdeka yang mampu bersaing dengan Eropa.

TRANSFORMASI KEKHALIFAHAN ISLAM MENJADI NEGARA BANGSA REPUBLIK TURKI

Dalam kondisi sosial politik yang kacau akibat pendudukan sekutu atas wilayah Turki Utsmani, Musthafa Kemal Attaturk tampil sebagai pejuang bagi masyarakat Turki. Attaturk bersama K. Karabiker berhasil membangkitkan identitas dan semangat kebangsaan dengan memposisikan ancaman militer sekutu sebagai antitesis. Karakiber dan Attaturk pun berhasil pula menyatukan pelbagai elemen masyarakat yang ingin merdeka dan menggerakkan mereka kepada

gagasan nasionalisme yang lebih realistis setelah diilhami dari konsep nasionalisme Gokalp. Strategi Attaturk bersama kelompok nasionalis seperti Fuad, Refat, dan Rauf selanjutnya adalah mengobarkan Perang Kemerdekaan. Attaturk pun mendirikan pemerintahan baru di Ankara-Anatolia demi kepentingan politik dan pemerintahan yang serba darurat. Ia berdalih bahwa Sultan di Istanbul berada dalam kekuasaan Sekutu. Demi kepentingan kemerdekaan maka dibentuk “Himpunan Untuk Mempertahankan Hak-Hak Anatolia dan Rumelia” serta Majelis Nasional Agung.²⁵ Dalam waktu yang relatif singkat, kelompok nasionalis berhasil memenangkan serangkaian perang dan memaksa sekutu mengakui kedaulatan bangsa Turki Usmani di bawah rezim nasionalis di Ankara–Anatolia.²⁶

Fenomena di atas dengan segera direspon oleh para elit politik, birokrat dan militer serta intelegensia dari kubu nasionalis Turki yang untuk menstranformasikan kekhalifahan islamiyah dinasti Turki Utsmani dari rezim multi-nasional menjadi sebuah negara bangsa–Republik Turki.²⁷ Dalam format di

²⁵ Lihat Kenneth W. Morgan, *Islam Jalan Lurus*, terj. Abu Salam (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 122. Lihat pula H.A. Mukti, *Islam dan sekulerisme...*, 77. Secara pragmatis etis, nasionalisme Turki yang dikembangkan pada masa itu berkaitan dengan usaha untuk memberlakukan tekanan moral pada tiap individu untuk mempertahankan diri atau melakukan suatu pembunuhan di medan perang demi kepentingan nasional. Mengenai pertentangan nasionalisme dengan nilai-nilai universal ini lihat Hans J. Morgenthau, *Politik antar Bangsa*, terj. A.M. Fatwan (Jakarta: Yayasan Obor, 1991), 118.

²⁶ Pengakuan Sekutu terhadap Rezim Turki di Ankara di atas memiliki beberapa kontroversi sejarah. Menurut sebagian sumber penghapusan kekhalifahan Turki ini telah direncanakan oleh Kemal bersama Inggris. Dalam sebuah perjanjian yang bersyarat antara Kemal dengan Inggris; Persyaratan Curzon (21 November 1923) di mana kelompok Kemal harus menghilangkan khilafah Islamiyah dan mengusir serta menyita harta khalifah. Perjanjian ini dilaksanakan delapan bulan kemudian. Dialog Jumat, “Konspirasi Untuk Meruntuhkan” dalam *Republika*, 3 Maret 2006, 3.

²⁷ Kasus nasionalisme Turki ini berbeda dengan negara-negara lain, seperti Indonesia di mana nasionalisme muncul sebagai pembentukan identitas baru guna melepaskan diri dari kolonialisme sedangkan di Turki lebih cenderung untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini, penulis melihat pula bahwa nasionalisme di Turki dipengaruhi oleh perkembangan nasionalisme di Eropa. Pada abad ke XVIII, bangsa Eropa perlu menekankan identitas sebagai sebuah bangsa yang berdiri sejajar dalam hal harkat dan martabat dengan bangsa Inggris dan Perancis. Fenomena ini berkembang di Turki setelah di bawa oleh kelompok intelegensia sepulang dari studi dari Eropa. Nasionalisme diartikan sebagai sebuah pandangan yang berpusat pada diri sebagai sebuah bangsa. Hal ini dianggap sebagai sebuah fenomena umum untuk mensolidariskan diri dengan kelompok yang senasib. Mengenai nasionalisme lihat E. Kus Eddy Sartono, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: UNY Press, 2002), 10. Negara-Bangsa merupakan asosiasi politik yang terdiri dari keragaman ras, suku, agama dan dalam perbedaan ini mereka saling bersatu. Dalam konteks ini, negara-bangsa berdiri melampaui kelompok primordialistik; keterikatan individu terhadap kelompok yang didasarkan atas nilai-nilai “given”, seperti agama, suku, bahasa, bahasa, asal daerah dan adat. Mas`udi Rauf, *Konsensus Politik* (Jakarta: Dep. Pendidikan Nasional, 2002), 62.

atas, elemen-elemen teori nasionalisme Gokalp menjadi landasan ideologis bagi perwujudan negara bangsa Turki, meskipun terdapat beberapa penyimpangan dalam kasus posisi agama Islam. Perubahan-perubahan pun dengan segera digulirkan, mulai Undang-Undang Dasar, Sistem Pemerintahan, Militer, Tata Negara, hingga Kewarganegaraan.²⁸ Perombakan besar-besaran terjadi pada tahun 1922, di mana pemerintahan Turki Utsmani yang dikepalai sultan dihapuskan dan dua tahun kemudian kekhalifahan Utsmaniyah dibubarkan. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Dasar Turki disyahkan, dengan tegas dinyatakan dalam pasal 1, bahwa negara Turki adalah Republik, Nasionalis, Kerakyatan, Kenegaraan, Sekularis, Revolusionis, dan dinyatakan pula dalam pasal 3 bahwa Kedaulatan dengan tanpa syarat berada di tangan bangsa.²⁹

Nasionalisme yang muncul dan tumbuh subur di Turki nampak telah dijumpai oleh serangkaian peristiwa sosial-politik dalam sebuah dialektika sejarah yang dilakukan dengan kesadaran rasionalitas. Hal ini dilakukan dengan merumuskan ciri-ciri objektif akan identitas kebangsaan yang meliputi bahasa, asal-usul geneologi, sejarah sehingga memungkinkan individu sebagai satuan rakyat memberikan dasar pembenaran rasional dari tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dalam sebuah kesadaran bernegara. Namun dalam perkembangan sejarah Turki, paham kebangsaan dalam ide nation model Turki ini tumbuh dalam sebuah kontradiksi ketika pemimpin berlaku otoriter – bukan berlaku demokratis – sebagaimana nampak dalam kepemimpinan Kemal Ataturk. Ghia Nodia mengatakan bahwa bangsa adalah sebutan lain dari untuk “kami sang rakyat”, sehingga nasionalisme harus bersinergi dengan demokrasi, bukan pemberlakuan sebuah otoritarianisme penguasa.³⁰

Secara teoritik, ideologi nasionalisme Gokalp dan Attaturk telah memberikan saluran bagi proses transformasi kekhalifahan dinasti Turki Utsmani menjadi republik Turki. Kasus di atas merupakan sebuah fakta yang sangat

²⁸ Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, terj. Irfan Abu Bakar (Bandung: Mizan, 2004), 584.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1993), 275.

³⁰ Mengenai nasionalisme dan demokrasi ini lihat Ghia Nodia, “Nasionalisme dan Demokrasi” dalam *Nasionalisme, Konflik Etnik, dan Demokrasi*, terj. Somardi (Bandung: ITB Press, 1998), 4.

mengejutkan musuh-musuh Turki dan terlebih lagi Dunia Muslim, akan tetapi mengingat kontekstualitas dan kompleksitas masalah yang mengitari dinasti Utsmaniyah, ketetapan tersebut dinilai cukup realistik. Meskipun demikian, republik Turki masih menghadapi pelbagai persoalan yang meski diselesaikan demi mempertahankan eksistensi Turki sebagai negara bangsa. Masalah ini terkait dengan Islam sebagai sebuah institusi agama yang telah mengakar kuat dalam sistem sosial dan budaya masyarakat.

Di masa kekhalfahan, agama Islam merupakan basis dasar bagi pembentukan tatanan institusional dan struktural. Secara eksplisit Konstitusi 1876 menyebutkan bahwa dinasti Turki Utsmani adalah Kerajaan Islam. Merujuk pada konstitusi tersebut maka syari`at meski menjadi landasan hukum dan perundang-undangan bagi pelaksanaan kehidupan negara dan pemerintahan. Dalam konteks ini – terkait dengan kebutuhan interpretatif terhadap teks – ulama memiliki peran dan fungsi utama dalam pemerintahan.³¹ Di lain sisi, konsep agama dan kerajaan menjadi tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Hal ini tidak selaras dengan ide nasionalisme yang menjadi fondasi utama republik Turki, sehingga mengharuskan Attaturk untuk mengakhiri institusi sultan–khalifah Turki Utsmani melalui agenda sekulerisme serta revolusionisme. Dalam nasionalisme model Gokalp dan Attaturk, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan penguasa bertanggungjawab kepada rakyat melalui parlemen.

Institusi Syaikh al-Islam merupakan lembaga yang tidak dapat dipertahankan dalam konteks negara republik Turki. Dalam format Utsmaniyah, Syaikh al-Islam berada pada fungsi eksekutif akan tetapi dengan kapasitasnya sebagai institusi agama, ia dapat memberikan fungsi kontrol terhadap institusi yudikatif dan legislatif. Secara struktural–konstitusional, produk hukum Syaikh al-Islam menjadi acuan normatif bagi kebijakan politik dan pemerintahan yang dijalankan perdana menteri atau shadr al-a`dham dan bahkan sultan sekalipun.³²

³¹ Harun, *Pembaharuan dalam...*, 134.

³² Shadr al-A`dham memiliki dewan kementerian dan secara hirarkis membawahi Pasya (Gubernur) dan `Alawiyah (Bupati). Lihat Badri Yatim, *Sejarah Pradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 1998.

Pada dataran sosial politik, rezim Turki mengeliminasi UU Pidana dan Perdata, serta Perdagangan yang berasaskan Islam dan sebagai ganti diadopsi UU dari Eropa, seperti UU Pidana Itali, UU Pidana Swis, serta UU Perdagangan Jerman. Sekolah-sekolah agama ditutup diganti sekolah moderen dengan tanpa pelajaran ilmu agama. Secara kultural, simbol-simbol Islam pun dilarang diganti dengan simbol-simbol dari budaya masyarakat Eropa. Alfabet dari Arab dan Persi diganti dengan Latin, sementara kosa kata Arab dan Persi diganti Turki. Secara keras pemerintah pun melarang pelbagai aktivitas kelompok keagamaan atau ketharikatan. Secara keseluruhan, kebijakan ini diarahkan untuk melenyapkan tatanan simbol kultural–Islam guna membentuk identitas nasional Turki yang moderen konstruk rezim Attaturk.³³ Dalam kasus ini, Attaturk banyak berbeda dengan Z. Gokalp yang tetap mengatakan bahwa nasionalisme Turki bukan pembaratan, terlebih membuang Islam.

Secara umum di masa dinasti Turki Utsmani, agama tidak memiliki batas ruang dan hampir selalu menelusup dan memberikan dasar legitimatif terhadap konsep-konsep politik dan normatifitas tatanan institusional dan struktural pemerintahan. Logika tersebut, berbeda ketika dinasti Utsmani berdiri sebagai negara Republik Turki, dalam kasus ini logika sekuler menjadi dominan menggeser peran–fungsional agama. Sebagai konsekuensi logis, maka Perang Saudara pun tidak terelakkan antara pro sultan–khalifah yang merepresentasikan kelompok islamis menghadapi kubu pro negara–bangsa yang merepresentasikan kelompok sekuleris.

Fenomena perlawanan kelompok islamis sebagai tandingan begi rezim Attaturk pun terus berlangsung mengiringi sejarah awal republik Turki. Serangkaian pemberontakan muncul di tahun 1930, 1933, dan 1935 yang dilancarkan oleh kelompok keagamaan tharikat Naqsabandi, terutama pimpinan Said Nursi. Dalam batas tertentu, Attaturk telah bertindak terlalu jauh terhadap agama Islam, sehingga memunculkan kekecewaan masyarakat muslim. Secara umum, kekacauan sosial politik yang dilatarbelakangi isu agama sepanjang

³³ Mukti Ali, *Islam dan Sekulerisme...*, 120-124. Mengenai prinsip-prinsip Attaturkisme, seperti Republik, Nasionalis, Populis, Etatis, Sekuleris, Reformis lihat Roderic H. Davidson, *Turkey* (New Jersey: Prentice Hall, ttt.), 139.

kepemimpinan Attaturk merepresentasikan sebuah perlawanan terhadap rezim nasionalis sekuler yang telah mendomestisasikan atau mengasingkan agama dari ranah publik dalam sebuah masyarakat religius.³⁴

Dalam rangka mengatasi kekacauan politik dalam negeri, Dewan Nasional Agung mengesahkan sebuah Undang-Undang untuk memelihara ketertiban nasional. Sebuah Undang-Undang yang membolehkan rezim Attaturk untuk berlaku diktaktor terhadap segala sesuatu yang menghambat cita-cita nasionalisme. Tindakan serba militer pun segera dipraktikkan terhadap pelbagai gangguan nasional. Dalam format demikian, rezim Attaturk menjadi kebal terhadap perselisihan internal dan relatif stabil.³⁵ Meskipun ketetapan Dewan Nasional tersebut bertentangan dengan sistem pemerintahan Turki yang menganut demokrasi dan parlemen, Attaturk hampir berkuasa tanpa pihak oposisi yang efektif hingga akhir kekuasaannya. Dalam masa itu, hampir dipastikan muslim Turki mengalami keterputusan generasi dan Islam seolah-olah terlupakan.

Setelah Attaturk meninggal di tahun 1938, Ismet Inonu – koleganya yang setia – memegang kepemimpinan Turki, terjadi sebuah perubahan iklim politik baru. Pergeseran iklim politik tersebut semakin menguat sesuai Perang Dunia Kedua dengan ditandai berakhirnya pemerintahan sistem satu partai menuju multi partai. Amerika Serikat – setelah Perang Dunia Kedua berperan sebagai pengaman politik dan pembangunan ekonomi Turki – mulai mengurangi politik model kultur paternalistik. Angin segar demokrasi ini memberikan keuntungan bagi gerakan-gerakan muslim di tingkat masyarakat bawah. Di tahun 1950, kubu pro Attaturk berhasil dikalahkan dalam sebuah pemilu oleh partai Demokrat. Rezim partai Demokrat masa kepemimpinan Adnan Menderes mengawali sejarah baru bagi kehidupan demokrasi negara Turki. Pelbagai isu sosial politik pun secara terus menerus mengalami pengendoran dari kontrol pemerintah.³⁶ Kehidupan keagamaan masyarakat muslim dengan segera memperoleh kembali beberapa hak dan kebebasan mereka walaupun elit sekuler Turki selalu menaruh sikap curiga.

³⁴ Mukti, *Islam dan Sekulerime...*, 125.

³⁵ Ibid, 90.

³⁶ Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial...* jilid III, 92-93.

PENUTUP

Dinasti Utsmani dengan khilafah islamiyahnya merupakan simbol kesatuan serta kekuatan politik muslim yang terakhir. Dalam masa Turki Utsmani – secara ideologis – telah meletakkan agama Islam sebagai supra-identitas yang mentransendensikan pelbagai perbedaan dan batasan-batasan alamiah, sejarah dan sosio-kultural membentuk sebuah entitas masyarakat politik-muslim di bawah institusi khalifah-islamiyah. Memasuki abad moderen, kemegahan Turki Utsmani berangsur surut ketika teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang, merangsang kebangkitan ekonomi dan militer, diikuti persaingan politik dan semangat nasionalisme di pelbagai kawasan Eropa. Wilayah propinsial di Asia, Afrika, dan Eropa secara pelan terlepas dan melepaskan diri dari Istanbul. Turki Utsmani sebagai pemangku khilafah islamiyah secara sendirian tidak mampu menghadapi kompleksitas masalah hingga berujung pada keruntuhan.

Kehancuran khilafah Utsmaniyah di Istanbul menjadi momen bagi Musthafa Kemal Attaturk untuk membangun masyarakat Turki yang baru berdasarkan nasionalisme yang diwujudkan dalam bangunan negara bangsa. Islam dalam tafsir ideologi nasionalisme Turki dianggap tidak berhasil menyelesaikan pelbagai persoalan sosial politik. Islamisme model Utsmani Muda dianggap gagal memenangkan Turki Utsmani dalam percaturan politik lokal dan global. Dalam format demikian, transformasi menuju negara bangsa untuk mempertahankan eksistensi masyarakat Turki yang merdeka dianggap sebuah jawaban.

Masalah baru muncul ketika nasionalisme Turki membuang Islam sebagai agama dan ideologi yang telah mengakar di tengah masyarakat. Sekulerisme yang dipaksakan secara militeristik hanya menui pertikaian di tengah masyarakat. Hal itu dilatarbelakangi penilaian bahwa Islam sebagai ideologi yang dibangun atas nama agama dinilai kontra produktif bagi kepentingan nasionalisme Turki. Simbol agama Islam di masyarakat pun dianggap perlu dilenyapkan untuk mewujudkan penguatan nilai nasionalisme. Turki melalui kekuatan militer untuk sementara waktu dapat bertahan dengan nasionalismenya. Pada tahapan selanjutnya, Turki harus kembali menerima Islam sebagai agama dan ideologi, karena nasionalisme tanpa agama di tengah masyarakat muslim hanya kediktatoran yang pasti runtuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Raziq, Ali. *al-Islam wa Ushul al-Hukm; Bahs fi al-Khilafah wa al Hukumah fi Islam*. Mesir: tt.p., 1925.
- Arif, Abd. Salam. “Politik Islam antara Aqidah dan Kekuasaan Negara” dalam *Negara Tuhan*. Yogyakarta: SR-Ins Publissing, 2004.
- Azra, Azyumardi. *Renaisans Islam Asia Tenggara*. Bandung: Risdakarya, 2000.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Moderenisme, hingga Psot Moderenisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- van, Dijk. “Ketakutan Penjajah, 1890-1918 Pan Islamisme dan Persekongkolan Jerman-India” dalam *Tiga Kekacauan dan Kerusuhan*, terj. Lilian D. T. Jakarta: INIS, 2003.
- Geerts, Clifford. *Ikatan Primordial dan Politik Kebangsaan di Negara Baru*, ed. Juwono S. Jakarta: Yayasan Obor, 1985.
- Hitti. Philip K., *History of Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- H. Davidson, Roderic. *Turkey*. New Jersey: Prentice Hall, ttt. terj. Somardi. Bandung: ITB Press, 1998.
- Hourani, Albert. *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, terj. Irfan Abu Bakar. Bandung: Mizan, 2004.
- Ibrahim Hasan, Hasan. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Khairuddin, Nasution. *Fadhlorrahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa&Academia, 2002.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. M. Ghufan jilid III. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1996.
- Morgan, Kenneth W. *Islam Jalan Lurus*, terj. Abu Salam. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Morgenthau, Hans J. *Politik antar Bangsa*, terj. A.M. Fatwan. Jakarta: Yayasan Obor, 1991.

- Mukti Ali, H.A. *Islam dan Sekulerisme di Turki Moderen*. Jakarta: Djembatan, 1994.
- Naquib al-Attas, Syed Muhammad. *Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan, 1990.
- Nasution, Harun. *Pembaruan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Pergerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Nodia, Ghia. “Nasionalisme dan Demokrasi” dalam *Nasionalisme, Konflik Etnik*, Rauf, Mas`udi. *Konsensus Politik*. Jakarta: Dep. Pendidikan Nasional, 2002.
- Sartono, E. Kus Eddy. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press, 2002.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Islam Klasik*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Stoddard, Lothrop. *Dunia Baru Islam*, terj. S, Gazalba dkk. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Tim Redaksi, *Islam, Negara dan Hukum*, terj. Syamsul Anwar. Jakarta: INIS, 1993.
- Toprak, Binnaz. *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, terj. Karsidi Diningrat. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Yatim, Badri. *Sejarah Pradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Political Thought*. Edinburg: Edinburg University Press, 1968.
- W. Arnold, Thomas. *The Caliphate*. London: Routledge, 1965.
- W. Morgan, Kenneth. *Islam Jalan Lurus*, terj. Abu Salam. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.